

Pendekatan Kolaborasi Model Hexahelix dalam Pengelolaan Garam di Kabupaten Sumenep

Bayu Daffario Ardana¹, Singgih Manggalou²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

21041010267@student.upnjatim.ac.id, singgih.m.adneg@upnjatim.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze and map the roles of each stakeholder involved in hexahelix collaboration, focusing on salt management in Sumenep Regency. Data were collected through interviews, documentation, and observation as part of a descriptive qualitative research approach. The focus of the research is to identify stakeholders involved in hexahelix collaboration related to salt management in Sumenep Regency. The results of the study indicate that the hexahelix collaboration in salt management in Sumenep Regency has been running optimally. However, for salt management in Sumenep Regency to be successful, the hexahelix element as a whole needs to enhance its role. The government, academics, the business world, the media, and financial institutions form the hexahelix in salt management. Each part serves a specific purpose in achieving the common goal. While the implementation process is collaborative and complementary, it is important for all stakeholders to understand their primary functions before formulating policies and implementing the hexahelix initiative.

Keywords: Salt; Hexahelix; Management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memetakan peran masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi hexahelix, yang berfokus pada pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, serta observasi sebagai bagian dari metode penelitian kualitatif deskriptif. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam kolaborasi hexahelix terkait pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi hexahelix dalam pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep sudah berjalan secara optimal. Namun, agar pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep menjadi berhasil, komponen hexahelix secara keseluruhan perlu meningkatkan perannya. Pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, serta lembaga keuangan membentuk hexahelix dalam pengelolaan garam. Setiap bagian melayani tujuan tertentu dalam mencapai tujuan bersama. Meskipun proses implementasi bersifat kolaboratif dan saling melengkapi, penting bagi semua pemangku kepentingan untuk memahami fungsi utama mereka sebelum merumuskan kebijakan dan melaksanakan gagasan hexahelix.

Kata kunci: Garam; Hexahelix; Pengelolaan

PENDAHULUAN

Samudera yang luas dan banyaknya pulau yang membentuk Indonesia menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia. Sumber daya hayati dan non-

hayati melimpah di sepanjang garis pantai Indonesia yang panjangnya mencapai 99.093 Km (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023). Indonesia memiliki potensi besar untuk produksi garam karena memiliki luasnya garis pantai serta melimpahnya sumber daya laut. Indonesia memiliki garis pantai yang luas, namun tidak semua pantai cocok untuk dijadikan ladang garam, karena hanya pantai yang memenuhi kriteria tertentu yang boleh digunakan untuk lahan garam.

Di Indonesia, satu dari sekian daerah produsen garam terbesar ialah Pulau Madura, oleh karenanya daerah tersebut menjadi terkenal dengan sebutan Pulau Garam. Posisi geografis yang menguntungkan Pulau Madura, yang dikelilingi oleh pantai dan sebagian besar wilayahnya berbatasan dengan laut, memudahkan masyarakat untuk mengakses air laut guna produksi garam. Satu dari tiga kabupaten di Pulau Madura, Sumenep ialah tempat sebagian besar garam diproduksi. Pada tahun 2023 Kabupaten Sumenep tercatat sebagai penghasil garam tertinggi nomor dua di antara tiga kabupaten lainnya di Madura yaitu sebesar 208.684,91 ton yang tersebar pada 10 kecamatan (Dinas Kelautan dan Perikanan Sumenep, 2023). Banyak masyarakat di daerah tersebut yang merasakan manfaat dari tambak garam yang tersebar pada 10 kecamatan, terutama bagi mereka yang terlibat dalam industri garam. Sebagian masyarakat Sumenep memilih untuk bertani garam sebagai sarana guna pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Maka dari itu, mereka mengharapkan keuntungan yang besar ketika panen garam telah tiba.

Permasalahan yang dialami para petani garam Kabupaten Sumenep tidak jauh beda dengan petani garam daerah lain. Ketergantungan petani garam tersebut terhadap iklim dan cuaca juga menjadi salah satu masalah yang terjadi. Kondisi tersebut diperlihatkan melalui metode yang digunakan oleh petani garam ketika proses produksi garam di Kabupaten Sumenep masih didominasi oleh metode tradisional. Kondisi tersebut diperlihatkan melalui minimnya infrastruktur dasar seperti jaringan irigasi, gudang penyimpanan, dan penggunaan geomembrane. Petani garam juga mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang karena kurangnya pengetahuan akan teknologi modern dan metode pertanian yang lebih baik. Kemurnian dan produktivitas garam yang tidak memadai, ditambah dengan kesenjangan regional yang signifikan, menimbulkan masalah ekonomi bagi petani garam. Selain itu, hanya garam kasar atau garam krosok yang dijual oleh produsen garam (Putri, Destryana, & Ribut, 2020). Adapun persoalan lainnya yang sering ditemui di lapangan ialah faktor ekonomi. Petani garam di Sumenep terjebak dalam rantai pasok yang dikuasai oleh tengkulak atau pedagang perantara. Persaingan tidak sempurna dalam pasar monopoli baik bagi pelaku pasar tetapi buruk bagi pihak lain, seperti produsen garam (Widiyastutik dkk., 2016).

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya baiknya kolaborasi diantara bermacam golongan di Kabupaten Sumenep dalam mengelola produksi garam. Industri pengguna garam mempunyai efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan sehingga memerlukan perlindungan pemerintah (Wedari, P., & Sukadana, 2020). Kebutuhan ini muncul dari kenyataan bahwa *stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan garam sering kali beroperasi secara individu karena dukungan dari

pihak masyarakat yang tidak mencukupi. Mempergunakan ide hexa-helix guna mengelola potensi daerah (Zakaria et al., 2019). Ketika dua orang ataupun lebih bekerja sama menuju suatu tujuan bersama, dikatakan mereka tengah berkolaborasi (Dorisman et al., 2021). Dengan demikian, teori hexahelix dapat dipergunakan guna mengkaji kolaborasi antar berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Sumenep. Enam pilar hexahelix—masyarakat, akademisi, bisnis, media, beserta lembaga keuangan—akan menjadi fokus penyelidikan ini serta berperan untuk meningkatkan kemampuan atau kapasitas petani garam dalam mengelola tambak garam.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan subjek penelitian melalui penggunaan teknik penelitian kualitatif dengan tujuan studi deskriptif (Anggara, 2015). Akademisi, perusahaan, komunitas, pemerintah, media, beserta lembaga keuangan ialah hexahelix ketika pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep, dan penelitian ini bermaksud mengidentifikasi mereka semua. Penelitian ini mempergunakan teknik “*purposive sampling*” ketika pemilihan informan yang paling mungkin memiliki informasi relevan dan penting untuk berkontribusi pada penelitian. Dua jenis data dipergunakan pada penelitian ini: primer beserta sekunder. Kolaborasi hexahelix ketika pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep lebih dipahami dengan mempergunakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dengan anggota Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep menjadi metode utama pengumpulan data dan informan pendukung seperti *Corporate Communication* PT Garam, Forum Petani Garam Madura, Tim Pemberitaan LPP RRI Sumenep, Koperasi Semangat Karya Muda, dan Pusat Kajian dan Inovasi Garam LPPM Universitas Trunojoyo Madura (UTM). Data sekunder diperoleh dari tinjauan pustaka dan catatan lain terkait pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep. Studi ini menggunakan analisis model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana sebagai strategi analisis datanya. Metode ini dicirikan oleh interaksi bolak-balik antara tiga langkah, yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penyusunan kesimpulan, alih-alih prosedur tunggal dan terpisah. Pertanyaan studi tentang kemitraan heksaheliks dalam pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep dijawab dengan mengolah dan mengevaluasi data yang diperoleh selama prosedur penelitian lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas, media, beserta lembaga keuangan membentuk enam peranan hexahelix yang merupakan kemitraan pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep. Implementasi, pengujian, dan verifikasi enam tanggung jawab agen dalam kolaborasi heksaheliks ini akan dijelaskan. Tujuan pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep dapat dicapai dengan menggabungkan berbagai sudut pandang melalui keenam komponen ini:

Pemerintah

Menurut teori hexahelix, pemerintah merupakan pihak yang memberikan kontribusi paling besar. Sebab, pemerintah sendiri mempunyai berbagai kewenangan, termasuk di bidang hukum dan ketertiban umum. Dari komponen tersebut, pemerintah memegang peranan paling besar. Pemerintah berperan sebagai pemilik kewenangan di bidang hukum dan kebijakan publik. Seperti peran dalam mengeluarkan izin, penentuan kebijakan, pemberdayaan masyarakat, pemberian insentif dan hibah yang dapat digunakan sebagai pengembangan inovasi dan infrastruktur dasar (Sudiana et al., 2020). Selain sebagai regulator dan koordinator bagi aktor-aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan garam, pemerintah juga berperan sebagai fasilitator. Indikator utama keberhasilan visi, tujuan, sasaran, dan strategi suatu organisasi ialah kualitas kepemimpinannya di bidang tata kelola (Septiana et al., 2021). Perangkat Daerah yang terlibat pada pengelolaan garam adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Pemerintah dapat menjadi penghubung antara lima sektor lainnya yang membentuk komponen Hexahelix. Dalam peranan pemerintah, yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep dibagi menjadi 4, yaitu peran pembuat kebijakan, pemberdayaan, pelatihan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Sumenep ketika mendukung pengelolaan garam terwujud pada “Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam” dijelaskan bahwa pengelolaan garam dapat dilakukan melalui kegiatan seperti: pelatihan dan pendidikan, bimbingan dan pendampingan, kolaborasi dengan dunia usaha, aksesibilitas terhadap informasi dan sumber daya ilmiah, serta penguatan institusi yang sudah ada untuk menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan berdaya saing bagi petani garam. Ketika pemerintah serius memainkan peran sebagai katalis, ia akan meningkatkan fokusnya dalam memberikan informasi komprehensif kepada pelaku bisnis, termasuk rincian tentang potensi bantuan federal dan negara bagian (Komalasari, 2021). Hal ini dibuktikan dengan adanya “Program Pengembangan Usaha Garam Rakyat” (PUGAR) yakni suatu program pemberdayaan petani garam diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep merupakan kegiatan yang dilakukan untuk tetap menyukseskan aktivitas petani garam di Kabupaten Sumenep. Peran lain pemerintah dalam konteks pengelolaan garam, yaitu mengadakan pelatihan serta pendampingan kepada petani garam di Kabupaten Sumenep. Pelatihan tersebut berupa pelatihan penambahan zat-zat tambahan seperti yodium. Di samping melakukan pelatihan, Dinas Kelautan dan Perikanan juga ikut serta dalam pendampingan kepada petani garam untuk meningkatkan kualitas garam yang diproduksi di Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya, bisa dijelaskan pemerintah kabupaten telah berperan dengan baik dalam pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep. Dapat dikatakan bahwa pemerintah kabupaten cukup serius dalam mendukung pengelolaan garam

dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep.

Dunia Usaha

Dalam model hexahelix, bisnis memiliki peran sebagai pemberi nilai tambah (*enabler*). Bisnis sebagai organisasi yang dapat menerapkan perubahan untuk menghasilkan nilai dan mempertahankan pertumbuhan jangka panjang (Irawan, 2021). Hal ini dapat dicapai dengan melakukan hal-hal seperti menawarkan infrastruktur informasi dan komunikasi, reformasi teknologi dan SDM. Menurut Sudiana et al., (2020) bisnis diartikan sebagai pelaku bisnis atau pengusaha. Peranan bisnis untuk dapat mendukung inovasi antara lain dengan dukungan permodalan, kerja sama bisnis, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Peranan bisnis untuk dapat mendukung inovasi antara lain dengan dukungan permodalan, kerja sama bisnis, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Dalam pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep yang berperan sebagai bisnis ialah PT Garam Persero. Peran bisnis sebagai bentuk keterlibatan dalam upaya pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep yakni memberikan nilai tambah serta mendukung dan mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan, dengan mendukung dan mempertahankan eksistensi potensi sektor pergaraman di Kabupaten Sumenep.

PT Garam sebagai komponen bisnis telah menjalankan peranan yang penting, yakni menjadi salah satu strategi penyebaran informasi dan edukasi terkait sektor pergaraman. Strategi yang dilakukan PT Garam yaitu menyediakan berbagai informasi dan edukasi kepada masyarakat dan petani garam melalui media internal dan platform media sosial. Peranan bisnis lain yakni memberikan pelatihan dan pemberdayaan petani garam dan bantuan fasilitas pendukung yaitu seperti gerobak sorong, kincir angin, dan juga geomembran, serta program sertifikasi untuk memastikan bahwa produksi garam memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan memberikan bantuan berupa alat dan infrastruktur, PT Garam tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi petani, tetapi juga mendorong mereka untuk beradaptasi dengan praktik terbaik dalam produksi garam. Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dan PT Garam sama-sama telah menandatangani MoU. Kerja sama ini tidak hanya menciptakan ruang untuk penelitian dan pengembangan inovasi dalam pembuatan garam, tetapi juga menunjukkan komitmen PT Garam dalam mengembangkan kualitas dan efisiensi produksi garam Kabupaten Sumenep. Peran PT Garam sebagai sektor bisnis dalam pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep menjadi semakin jelas, yaitu sebagai penggerak utama dalam menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing produk garam lokal.

Dari pernyataan di atas, maka dapat dikatakan bahwa peran bisnis dalam hal ini PT Garam Persero telah menjalankan perannya sebagai pemberi nilai tambah serta mendukung dan mempertahankan pertumbuhan berkelanjutan, dengan mendukung dan mempertahankan eksistensi potensi sektor pergaraman di Kabupaten Sumenep dalam pengelolaan garam yang ditekankan pada keterlibatannya dalam tata kelola garam di Kabupaten Sumenep melalui pelatihan dan pemberdayaan petani garam dan

penyedia fasilitas sarana dan prasarana guna memaksimalkan pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep.

Akademisi – Perguruan Tinggi

Akademisi dalam model hexahelix memiliki peran sebagai konseptor. Peranan sebagai konseptor dalam pengelolaan garam ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan seperti: riset penelitian dan inovasi produk, pendidikan dan penyuluhan, serta kolaborasi dengan berbagai lembaga yang dilakukan untuk dapat meningkatkan keterampilan dalam mengelola garam. Akademisi dapat kontribusi pada pengembangan sumber daya manusia seperti lulusan, dosen, peneliti yang memegang peran penting dalam pemanfaatan pengetahuan yang miliki dan penelitian yang dapat menghasilkan sebuah inovasi atau produk baru (Sudiana et al., 2020).

Keterlibatan Perguruan Tinggi yakni Universitas Trunojoyo Madura (UTM) terlihat dari komitmen akademisi dalam mengembangkan sektor garam sebagai komoditas lokal yang strategis di Kabupaten Sumenep. Dengan menekankan pentingnya riset yang berfokus pada hilirisasi produk, akademisi menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan industri dan masyarakat. Selain itu, kolaborasi dengan PT Garam menegaskan pentingnya jaringan dalam ekosistem inovasi. Dalam konteks teori kolaborasi hexahelix, peran akademisi di sini sangat krusial, karena mereka bukan sekadar berfungsi menjadi peneliti, namun juga menjadi penghubung diantara berbagai elemen. Adapun bentuk nyata yang lain dari keterlibatan akademisi dalam hal ini Perguruan tinggi adalah dengan memberikan ilmu tentang memproduksi garam yang baik. Hal ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan pendidikan dan penyuluhan berupa sertifikasi petambak garam. Dengan sertifikasi ini, para petambak yang dinyatakan kompeten akan memiliki pengakuan resmi yang diakui secara nasional, sehingga dapat memberikan jaminan kualitas atas hasil produksi mereka.

Beberapa kendala dirasakan oleh akademisi dalam pengelolaan garam melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan seperti ketergantungan para petani garam, serta pola pikir turun temurun yang masih melekat di petani garam sehingga kegiatan tersebut belum maksimal. Dari pernyataan di atas, maka dapat dikatakan peran akademisi dalam hal ini Perguruan Tinggi Universitas Trunojoyo Madura (UTM) telah melaksanakan perannya sebagai konseptor dalam pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaannya sehingga perlu untuk dilakukan pendampingan yang lebih untuk dapat memantapkan pengetahuan yang diberikan sehingga petani garam tidak mengalami ketergantungan dalam mengimplementasikan pengetahuan yang diberikan.

Komunitas

Dalam pengelolaan garam, komunitas berfungsi menjadi akselerator serta bertindak sebagai objek strategis. Menurut (Sudiana et al., 2020), komunitas berperan dalam mendukung inovasi dengan cara memberikan masukan dan ide yang

dapat membantu perkembangan inovasi tersebut. Di Kabupaten Sumenep, terdapat komunitas petani garam, yaitu Forum Petani Garam Madura (FPGM) yang merupakan wadah bagi petani garam di Madura, khususnya Kabupaten Sumenep yang memiliki ketertarikan dan tujuan yang sama di sektor pergaraman untuk dapat berkumpul dan berkembang. Posisi komunitas yang berada di tengah-tengah masyarakat membuat ruang gerak dari komunitas semakin mudah. Komunitas berperan sebagai perantara atau penghubung dengan pemangku kepentingan lainnya untuk pengelolaan garam. Adapun keterlibatan FPGM di Kabupaten Sumenep cukup besar dalam mendukung upaya pengelolaan garam. Hal ini di tunjukkan dengan dukungan yang diberikan FPGM dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kapasitas petani garam melalui kegiatan yang mendukung perubahan pada Sumber Daya Manusia (SDM) oleh FPGM, seperti terlibatnya dalam program dari pemerintah, penyaluran aspirasi petani garam, dan kerja sama dengan berbagai sektor seperti PT Garam, Universitas Trunojoyo Madura, dan LPP RRI Sumenep.

Dalam konteks kolaborasi *hexahelix*, FPGM sebagai komponen komunitas, memiliki peran penting dalam menjembatani komunikasi antara petani garam dan pemerintah, serta dalam mengadvokasi kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka sehingga dapat mendorong agar pemerintah lebih aktif dalam memberikan pendampingan yang dibutuhkan. FPGM juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak lain dalam upaya pengelolaan garam seperti dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumenep, LPP RRI Sumenep, bahkan Universitas Trunojoyo Madura (UTM), serta juga aktif mengikuti rapat ataupun seminar terkait dengan sektor pergaraman. Keterlibatan FPGM dalam wawancara di media seperti LPP RRI Sumenep menunjukkan upaya mereka untuk meningkatkan kesadaran publik terkait bermacam isu pergaraman serta mendorong pemerintah agar lebih responsif kepada isu tersebut yang dihadapi oleh petani garam.

Dengan demikian, peran FPGM dalam pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep tidak hanya terbatas pada produksi, tetapi juga mencakup advokasi untuk keikutsertaan yang lebih besar ketika pengambilan keputusan serta pengembangan kebijakan. Meskipun FPGM berusaha untuk terlibat ketika proses pengambilan keputusan, kenyataannya mereka masih belum melihat hasil yang signifikan dari regulasi yang ada, yang seharusnya dapat berpihak pada mereka dan berkontribusi pada peningkatan perekonomian petani garam. Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih erat antara semua komponen dalam model *hexahelix* diperlukan untuk menciptakan solusi yang efektif serta berkelanjutan bagi sektor pergaraman, serta memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi petani garam diakomodasi dengan baik.

Melalui pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa terdapat keterlibatan komunitas sebagai akselerator dalam mendukung pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep dalam berbagai acara yang dilakukan dalam rangka mendukung perubahan pada Sumber Daya Manusia (SDM) oleh FPGM, komunikasi serta koordinasi dengan pihak-pihak lain dalam upaya pengelolaan garam, serta aktif mengikuti rapat ataupun seminar terkait dengan sektor pergaraman, Namun dalam hal ini keterlibatan komunitas di Kabupaten Sumenep masih belum maksimal, hal ini karena masih

terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang disebabkan kurang dilibatkannya komunitas oleh pemerintah dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan sektor pergarahan.

Media

Media dalam model hexahelix berperan sebagai *expander*. Media mendukung pengelolaan garam melalui publikasi dalam bentuk penyebaran informasi dan edukasi. Media memiliki peran dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan segala macam variabel yang dibutuhkan oleh berbagai pemangku kepentingan (Sudiana et al., 2020). Publikasi yang dilakukan harus memiliki tujuan untuk dapat memberikan pengetahuan yang mendidik bagi masyarakat. Sekarang ini di era digitalisasi, media sosial sangat erat dengan kehidupan masyarakat. Melalui media sosial, maka informasi dapat disebarluaskan serta mampu diterima masyarakat dengan mudah serta cepat. Kemajuan dibidang teknologi informasi dan komunikasi menjadi kekuatan baru untuk menyebarkan informasi terkini terkait sektor pergarahan sekaligus menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh petani garam.

Media memiliki peran untuk dapat menghubungkan semua aktor utama terkait pengelolaan garam. Hal ini sejalan dengan prinsip kolaborasi *hexahelix* yang menekankan pentingnya sinergi antara berbagai komponen untuk mencapai tujuan bersama. Dalam pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep, penggunaan media sosial menjadi alat publikasi bagi setiap petani garam, dan juga menjadi publikasi untuk kegiatan yang dilakukan oleh petani garam anggota dari “Forum Petani Garam Madura” (FPGM). Media terlibat dalam pengelolaan garam seperti LPP RRI Sumenep, yang memberikan ruang bagi petani garam untuk dapat menyampaikan aspirasinya. LPP RRI Sumenep juga membantu meningkatkan pemahaman petani tentang praktik terbaik dalam produksi garam. Dengan melibatkan narasumber dari Dinas Kelautan, akademisi, dan petani sukses, media ini menciptakan dialog interaktif yang memperkaya perspektif petani dan mendorong mereka untuk mengadopsi teknologi baru. Dengan melakukan *update* di media sosial, tentu dapat meningkatkan kesadaran petani garam akan pentingnya pengelolaan garam yang baik dan juga dapat membantu petani garam dalam menentukan keputusan lebih baik ketika proses produksi mereka. Selain itu, media juga menjadi sarana untuk mendapatkan *feedback* dari pemerintah. Oleh sebab itu, pemerintah nantinya akan dapat mengetahui segala sesuatu yang dibutuhkan oleh petani garam.

Dari pernyataan di atas, maka dapat dikatakan peran media telah menjalankan perannya sebagai *expander* dalam pengelolaan garam. Pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk berjaring lebih luas oleh petani garam, juga sebagai sarana untuk berbagi informasi. Meskipun dalam pemanfaatan media sosial, masih menemukan kendala terkait kurangnya pengetahuan untuk mendapatkan *viewers* atau kunjungan yang tinggi, dan kurangnya pengetahuan untuk dapat memberikan gambar atau video-video yang menarik.

Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dalam model hexahelix berperan sebagai penghubung (*intermediary*) yang dibuktikan dengan adanya penyediaan akses informasi, pemberian pinjaman, dan membantu dalam proses pemasaran garam rakyat. Akses modal sangat penting bagi perkembangan usaha pertanian, terutama bagi petani garam. Modal tidak hanya menjadi *input* yang diperlukan dalam pertanian, tetapi juga berperan vital dalam meningkatkan produksi garam melalui penerapan teknologi terbaru. Fungsi koperasi sangat penting dalam membantu masyarakat mencapai potensi ekonomi penuh mereka dan dalam mewujudkan demokrasi ekonomi, yang dicirikan oleh transparansi, kesetaraan, kekeluargaan, serta solidaritas (Antasari, 2020). Pembentukan koperasi dapat dilihat sebagai metode efektif bagi anggota untuk berkolaborasi guna memaksimalkan potensi mereka serta memanfaatkan peluang usaha yang muncul. Pengembangan koperasi memungkinkan anggotanya untuk bekerja sama secara efisien (Siregar, 2020). Kerja sama ini juga mencakup kerja sama eksternal dengan bisnis lain, seperti pasar, investor, dan sumber pengetahuan dan teknologi. Anggota koperasi dapat saling membantu dan memanfaatkan sumber daya mereka untuk mencapai kesuksesan bersama.

Koperasi Garam Semangat Karya Muda dalam pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep berperan sebagai wadah bagi petani garam untuk mendapatkan akses informasi, sumber permodalan, dan pemasaran produk. Pernyataan tersebut searah pada prinsip dasar koperasi yakni bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi membantu anggotanya dalam hal akses informasi terkait pasar dan pengembangan sumber daya manusia (SDM). Ini menunjukkan bahwa koperasi berperan sebagai penghubung antara petani garam dan pasar, yang merupakan salah satu elemen penting dalam teori hexahelix. Pemerintah Kabupaten Sumenep melakukan kegiatan pendampingan kepada petani garam yang tergabung dalam Koperasi Semangat Karya Muda oleh melibatkan tenaga pendamping dari “Dinas Kelautan dan Perikanan”. Ini mencerminkan kolaborasi antara pemerintah (Dinas kelautan dan Perikanan) dan masyarakat (petani garam) dalam meningkatkan kapasitas produksi. Dukungan pemerintah menunjukkan adanya kolaborasi antara pemerintah dan industri. Bantuan seperti geomembran dan *excavator* dari pemerintah merupakan contoh konkret dari dukungan yang dapat meningkatkan kapasitas produksi anggota koperasi. Ini sejalan dengan prinsip hexahelix yang menekankan pentingnya kolaborasi diantara bermacam pihak ketika mewujudkan tujuan bersama.

Kendala yang dihadapi oleh koperasi, terutama dalam hal kelembagaan dan SDM, menjadi tantangan signifikan. Keterbatasan jumlah dan kualitas pengurus koperasi mengakibatkan kurangnya pemahaman tentang hak dan kewajiban anggota serta manajemen koperasi. Hal ini menciptakan masalah komunikasi dan manajemen yang berdampak pada kinerja koperasi. Dalam konteks *hexahelix*, ini menunjukkan perlunya kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan akademisi untuk memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi pengurus dan anggota koperasi. Melalui pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa koperasi garam sudah

menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kolaborasi yang efektif antara berbagai elemen dalam komponen hexahelix. Namun, tantangan dalam hal kelembagaan dan SDM perlu diatasi agar koperasi dapat berfungsi secara optimal. Pendampingan dan pelatihan yang berkelanjutan, serta dukungan dari pemerintah dan kerja sama dengan berbagai pihak, menjadi kunci untuk mengatasi kendala yang ada. Dengan demikian, pengembangan koperasi garam bukan hanya bergantung kepada usaha internal, namun juga kepada kolaborasi yang kuat dengan berbagai pihak eksternal.

Keterkaitan antar komponen dalam Kolaborasi Hexahelix

Di Kabupaten Sumenep, pengelolaan garam melibatkan keenam komponen hexahelix: pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, media beserta lembaga keuangan. Masing-masing dari enam komponen ini saling berkaitan dengan pemerintah, karena pemerintah sendiri memegang posisi yang sangat penting di antara komponen tersebut. Kerja sama antara akademisi dan pemerintah dapat dilihat dalam penelitian oleh akademisi yang dapat digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah. Komponen perguruan tinggi juga mencakup koneksi dengan dunia usaha, di mana mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengikuti program magang di perusahaan dan pegawai perusahaan juga dapat menjadi dosen tamu di perguruan tinggi. Terdapat hubungan lebih lanjut antara pemerintah dan sektor bisnis karena faktanya, agar perusahaan dapat beroperasi, mereka haruslah mematuhi peraturan yang ditetapkan pemerintah dengan memperoleh izin yang diperlukan. Dalam memantau kebijakan pemerintah, baik media maupun unsur masyarakat terkait dengan pemerintah. Komponen lembaga keuangan memiliki keterkaitan dengan pemerintah dan dunia usaha karena dalam kegiatan usahanya mengikutsertakan pemerintah dan dunia usaha sebagai mitra dari kegiatan usaha yang dioperasikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kolaborasi hexahelix dalam pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep terdiri dari enam komponen mempunyai perannya masing-masing, yaitu pemerintah sebagai *controller* dan regulator, akademisi sebagai konseptor, dunia usaha sebagai *enabler*, komunitas sebagai akselerator, media sebagai *expander*, dan lembaga keuangan sebagai *intermediary*. Sebelum penetapan kebijakan dan implementasi konsep Hexahelix, sangat penting bagi setiap pemangku kepentingan untuk memahami peran utama mereka, meskipun proses implementasi bersifat kolaboratif dan saling melengkapi. Pemerintah, dalam perannya sebagai pemimpin, harus secara efektif mengoordinasikan pemangku kepentingan dan melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi secara berkala agar pengelolaan garam di Kabupaten Sumenep berjalan secara maksimal. Pemerintah dapat secara proaktif mengawasi perkembangan di industri garam dan mengantisipasi masalah yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. CV PUSTAKA SETIA.
- Antasari. (2020). *Hukum Ekonomi Di Indonesia*. KENCANA
- Dinas Kelautan dan Perikanan. (2023). Data Produksi Garam Rakyat Kabupaten Sumenep Tahun 2023.
- Dorisman, A., Muhammad, A. S., & Setiawan, R. (2021). Kolaborasi Antar Stakeholder dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 19(1), 71.
- Irawan, H. (2021). *Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Elex Media Komputindo.
- Komalasari, N. dan E. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pembinaan Usaha Kecil Dan Menengah Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Kota Pekanbaru. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(2), 162–173.
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam.
- Putri, R. D., Destryana, R., & Ribut, S. (2020). Pemanfaatan Garam Krosok Sebagai Kreatif Bisnis Masyarakat Pesisir. *Journal of Food Technology and Agroindustry*, 2(1), 27–32.
- Septiana, A. D., Suprastiyo, A., & Swasanti, I. (2021). Collaborative Governance dalam Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten Bojonegoro. *In JIAN*, 5(1), 8–15.
- Siregar, A. P. (2020). Kinerja koperasi di indonesia. *VIGOR: Jurnal Ilmu Pertanian Tropika Dan Subtropika*, 5(1), 31–38.
- Sudiana, K., Erni T. S., Imas S., & Yunizar, Y. (2020). The Development And Validation Of The Penta Helix Construct. *Verslas: Teorija Ir Praktika / Business: Theory and Practice*, 21(1), 136–145.
- Wedari, P., & Sukadana, I. (2020). Garam Industri Impor Sebagai Input Kunci Sektor Industri Pengguna Garam Dan Multiplier Efeknya Terhadap Perekonomian. *E-Jurnal EP Unud*, 9(5), 1171–1199.
- Widiyastutik, M. A., Triana, D. H., & Ebban, B. K. (2016). Pemasaran Garam Rakyat di Desa Pangarengan Kecamatan Pangarengan Kabupaten Sampang. *Agritrop : Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian (Journal of Agricultural Science)*, 14(2), 222–230.
- Zakaria, Z., Sophian, R. I., Muljana, B., Gusriani, N., & Zakaria, S. (2019). The Hexa-Helix Concept for Supporting Sustainable Regional Development (Case Study: Citatah Area, Padalarang Subdistrict, West Java, Indonesia). *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 396(1).